

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Patar Simanjuntak, *Pekerjaan Elektrikal PLTMH: Mendukung Diklat Teknis Perencanaan dan Pembangunan PLTMH*, (Jakarta: Kementerian Energi dan SDM, 2009)
- A.W Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986)
- Agus Subagyo, *Relasi Negara dan Swasta Dalam Pembangunan (Dalam Jurnal Governance edisi Glokalisasi: Memadukan Nilai-Nilai Global dan Nilai-Nilai Lokal Dalam Pembangunan)*, (Bandung: Unpad, 2005)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Burhanudin A. Tayibnapi, *Administrasi Kepegawaian; Suatu Tinjauan Analitik*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1979)
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003)
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wadiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004)
- Moh. Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998)
- Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982)
- Sastra Djamika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)

Soetrisno, *Peningkatan Sumber Daya Manusia di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Raja Pustaka, 2003)

Sri Hartini dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Diklat Teknis;
7. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Diklat Teknis Pola Fasilitas Kabupaten/Kota/instansi lainnya.

INTERNET

Anugerah Dino, “*pendidikan dan pelatihan pegawai negeri*”
<http://www.anugerahdino.com/2014/pendidikan-dan-pelatihan-pegawai-negeri>.

Faktor Penghambat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan,
www.academia.edu/faktor.penghambat.pembinaan.pendidikan.dan.pelatihan.

